

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH PRIANGAN PADA MASA KOLONIAL TAHUN 1900-1942

2.1 Kondisi Geografis dan Administratif Priangan Abad ke-19 dan ke-20

2.1.1 Kondisi Geografis

Wilayah Priangan jika dilihat secara geografis terletak di Jawa bagian barat serta secara budaya masyarakat Priangan menganggap dirinya sebagai bagian dari orang Sunda.²⁴ Sebutan orang Sunda oleh orang yang tinggal di pesisir adalah *urang gunung*, *wong Gunung*, atau *tiyang gunung*.²⁵ Selain menjadi tempat tinggal suku Sunda, Priangan juga dimaknai sebagai kediaman dewa yang harus dihormati dan juga ada yang mengartikan menyerah dengan hati yang tulus. Hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa ketika terjadinya penyerahan wilayah priangan oleh Suriadiwangsa yaitu pangeran dari Sumedang Larang kepada Sultan Mataram pada tahun 1620. Kabar bahwa ketulusan hati Pangeran Suriadiwangsa yang mengakui kerajaan Sumedang Larang menjadi bawahan kesultanan Mataram dinamakan "*Prayangan*" yang memiliki arti tulus atau ikhlas yang kelak menjadi Priangan.²⁶

Luas wilayah Keresidenan Priangan pada abad ke -19 kurang lebih Pulau Jawa sekitar 21.524 km². Adapun wilayah batas-batas Keresidenan Priangan adalah sebelah utara berbatasan dengan Batavia dan Cirebon, sebelah timur Keresidenan Cirebon dan Banyumas, sebelah selatan serta barat daya berbatasan dengan

²⁴ Edi S Ekdjati, *Kebudayaan Sunda Suatu Pendekatan Sejarah* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2005) hlm 8-10.

²⁵ Nina H. Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*, 1 ed. (Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, 1998) hlm 30.

²⁶ Mumuh Muhsin Zakaria, "Priangan Abad ke-19 Dalam Arus Dinamika Sosial Ekonomi" *Pustaka Unpad*. (2010) hlm 7.

Samudera Hindia, dan batas di sebelah barat ada Keresidenan Banten. Untuk batas-batas alam wilayah membentang dari sebelah utara dengan pegunungan Salak-Gede serta Burangrang-Tangkuban Perahu, batas sebelah timur adalah sungai Citanduy, sebelah barat dengan Pelabuhan ratu dan Ciletuh, sebelah tenggara Selat Pananjung serta di sebelah selatan dan tenggara berbatasan dengan Cilauteureun.²⁷ Khususnya wilayah Priangan Tengah dengan ibukota Bandung memiliki kondisi geografis yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi sehingga menyerupai sebuah mangkok lalu kota ini terletak pada 6-7 lintang Selatan serta 107-108 Bujur Timur, disusul dengan ketinggian antara 680-750 meter di atas permukaan laut.

Priangan memiliki tanah yang subur sehingga tidak hanya menguntungkan penduduk pribumi yang mendiaminya, namun hal tersebut menarik bangsa Belanda yang datang sejak abad ke-17 dan mengalami peningkatan yang besar khususnya pada abad ke-19.²⁸ Potensi alam yang dimiliki oleh wilayah Priangan menimbulkan ajang persaingan antara tiga kekuatan yakni Banten, Mataram juga VOC VOC melihat bahwa potensi alam yang dimiliki Priangan sangat cocok untuk pengembangan berbagai usaha perkebunan tanaman yang dibutuhkan pasar dunia. Dengan demikian cara untuk memperoleh wilayah Priangan VOC harus bisa menaklukkan kesultanan Banten dan merebutnya dari kesultanan Mataram.. Kondisi geografis ini menjadikan wilayah Priangan terutama wilayah tengah seperti Bandung, Garut, serta Sumedang sebagai wilayah strategis untuk kepentingan politik serta ekonomi kolonial. Tidak hanya menjadi wilayah produksi untuk

²⁷ Mumuh Muhsin, "Terbentuknya keresidenan priangan," *Pustaka Unpad*, November (2008) hlm 14.

²⁸ Lubis, *Loc, Cit.*

kepentingan ekonomi kolonial, namun juga menjadi tempat pembentukan hubungan kuasa yang kompleks terutama perempuan pribumi yang terdorong dalam posisi subordinat seperti menjadi buruh, pelayan maupun nyai dalam relasi domestik yang berisi ketimpangan.

2.1.2 Kondisi Administratif

Wilayah administratif Priangan mengalami beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kepentingan pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Penyesuaian wilayah administratif terjadi seperti kabupaten Garut yang semula bagian dari Cianjur pada tahun 1915 menjadi bagian keresidenan Priangan serta kabupaten Ciamis yang pada awalnya bagian keresidenan Cirebon.²⁹ Pada tahun 1925, pemerintah membagi Keresidenan menjadi tiga *afdeeling* yakni kota Sukabumi sebagai ibukota dari Priangan Barat, kota Bandung sebagai ibukota Priangan Tengah, serta kota Tasikmalaya sebagai ibukota Priangan Timur. Wilayah serta beban kerja dari *afdeeling* yang setara dengan keresidenan menyebabkan ketiga *afdeeling* dipimpin oleh seorang residen.³⁰

Penggunaan istilah *West Java*, *Oost Java*, lalu *Midden Java* secara resmi digunakan pada tahun 1925.³¹ Namun, pada tahun 1931 pemerintah kolonial Hindia Belanda menghapus *afdeling* Priangan, Barat, Tengah, maupun Timur. Penghapusan ini dilakukan untuk efisiensi administrasi akibat beban kerja yang

²⁹ Miftahul Falah, Nina Herlina Lubis, dan Kunto Sofianto, "Morfologi Kota-Kota Di Priangan Timur Pada Abad XX – XXI; Studi Kasus Kota Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya," *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*. Vol. 9, No. 1 (2017) hlm 5-6.

³⁰ Miftahul Falah, " "Pertumbuhan Kota Tasikmalaya, 1820 1942 Dari Kota Distrik Menjadi Kota Kabupaten, 1820–1942. Vol. 7, no. 3. *Metahumaniora*. (2010) hlm 9.

³¹ Ekadjati, *Op. Cit.*, hlm 11.

semakin berat. Setelah dihapus terjadi penggabungan *afdeeling* seperti *Afdeeling West-Priangan* yang digabung dengan *Afdeeling Buitenzorg* lalu *Afdeeling Midden* serta *Oost Priangan* bergabung menjadi *Afdeeling Priangan*.³² Pada tahun 1937, wilayah administratif yang sebelumnya bernama *afdeeling* mengalami perubahan menjadi *residentie* untuk menyebutkan daerah otonom tingkat provinsi. Perubahan nama tersebut berdampak kepada wilayah *Residentie Priangan* yang hanya mencakup lima kabupaten yaitu Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan *Staatsgemeente* Bandung.³³

Perubahan struktur administrasi yang terjadi di wilayah Priangan tidak hanya sebatas untuk kepentingan efisiensi pemerintah kolonial Belanda, namun berdampak juga terhadap sistem tatanan sosial maupun ekonomi masyarakat Priangan. Terutama Bandung yang menjadi pusat administrasi maupun perkebunan serta pembagian wilayah administratif yang membuat kontrol kolonial serta pembentukan struktur sosial semakin kuat dan kompleks. Kompleksnya sistem tatanan sosial kolonial berdampak secara langsung kepada kehidupan masyarakat, terutama kepada posisi perempuan pribumi dalam sistem perkebunan dan hubungan kuasa sosial yang tercampur oleh budaya patriarki seperti yang tercermin dalam kehidupan nyai.

³² Suharto, *Pagoejoeban Pasoendan 1927-1942 : Profil Pergerakan etno-nasionalis* (Bandung: Satya Historika, 2002) hlm 68.

³³ Falah, Lubis, dan Sofianto, *Loc. Cit.*

2.2 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Priangan

2.2.1 Kondisi Ekonomi

Priangan adalah wilayah Hindia-Belanda yang tidak terlepas dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Priangan merupakan daerah perkebunan yang menghasilkan kopi sebagai komoditas utama di samping tanaman ekspor lainnya seperti tebu, nila, teh, kina dan lainnya. Namun, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tidak sebanding dengan produksi kopi yang melimpah sebab sistem perdagangan kopi tidak melibatkan secara langsung petani kopi Priangan melainkan didasari oleh sistem ikatan desa yang feodal yang lebih dikenal dengan sistem *Preangerstelsel*. Memasuki awal abad ke-19 Priangan mengalami peralihan sistem ekonomi ke Sistem Tanam Paksa yang membuat negara berperan dalam menentukan pola perdagangan tanaman khususnya tanaman ekspor.³⁴

Penyerahan wajib kopi kemudian dikenal dengan nama *Preangerstelsel* sangat menguntungkan VOC juga para penguasa lokal, namun bagi petani kopi tidak terlalu mendapatkan keuntungan sebab tidak terlibat secara langsung dalam proses perdagangan. Van den Bosch menjadikan sistem tanam paksa sebagai acuan untuk melaksanakan penanaman berupa komoditas lainnya yang laku di pasaran dunia. Pemerintah kolonial Belanda menganggap sistem tanam paksa sebagai alat untuk memperoleh keuntungan maksimum dengan cara yang paling ekonomis serta

³⁴ Sri Ana Handayani, "Geliat Ekonomi Masyarakat Priangan Era Pemerintahan Hindia Belanda 1900—1942," *Lembaran Sejarah*. Vol. 13, no. 2 (2018) hlm 222.

efektif.³⁵ Dikatakan sebagai sistem yang efektif sebab sistem ini hanya mementingkan hasil tanaman ekspor sedangkan para petani wajib bekerja tanpa dibayar. Pengaruh penerapan sistem tanam paksa bagi kaum pribumi tidak begitu positif karena kaum pribumi tetap termarginalkan berdasarkan kesetaraan ekonomi maupun budaya sehingga ketika melakukan transaksi perdagangan internasional dianggap terlalu lemah untuk dapat bersaing dengan pedagang Eropa.

Jarak antara Eropa dengan Hindia-Belanda diperpendek setelah dibukanya terusan Suez,³⁶ pada tahun 1870 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Agraria. Undang-Undang ini pada dasarnya mengatur mengenai sistem kepemilikan tanah yang diberikan untuk pengusaha industri swasta maupun penduduk. Tanpa izin pemerintah penduduk tidak diperbolehkan membuka lahan, sedangkan untuk pengusaha yang akan membuka perkebunan dikenakan berbagai syarat yang telah ditentukan. Pengusaha swasta diberikan fasilitas oleh pemerintah berupa modal dari bank pemerintah atau asing. Perlakuan berbeda tentunya dirasakan oleh pengusaha bumiputera yang tidak diizinkan untuk meminjam ke bank pemerintah dengan alasan pinjamannya dianggap terlalu kecil sehingga dikhawatirkan tidak dapat menutup biaya administrasi dan berisiko besar. Penerapan sistem liberalisme oleh pemerintah kolonial Belanda tentunya berpengaruh terhadap kebebasan memilih pekerjaan bagi masyarakat Priangan terutama petani yang tidak mempunyai tanah.³⁷

³⁵ A.M Djulianto, Suroyo., “Penanaman Negara di Jawa dan Negara Kolonial,” in *Fondasi Fistoris Ekonomi Indonesia*, ed. J. Thomas Lindblad (Yogyakarta: Pusat Studi sosial Asia Tenggara UGM dengan Pustaka Pelajar, 2012) hlm 115–142.

³⁶ Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis dan gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa Abad XVII – Medio Abad XX* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2011) hlm 3.

³⁷ Sri Ana Handayani, *Op. Cit.*, hlm 221.

Undang-Undang Agraria yang diberlakukan mulai pada tahun 1870 menyebabkan terjadinya lonjakan permintaan tenaga kerja pribumi yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk Eropa dan munculnya perusahaan-perusahaan Eropa di Hindia Belanda terutama Priangan. Perusahaan-perusahaan ini tentunya sejalan dengan jumlah perkebunan yang meningkat. Tercatat pada tahun 18902 terdapat 81 buah perkebunan teh, lalu 60 perkebunan kita. Perkebunan teh terbaik ada di Pangalengan dan di sekitar Gunung Patuha³⁸, sedangkan perkebunan kina milik pemerintah ada di Cinyiruan, kabupaten Bandung. Lonjakan perusahaan ini berbanding terbalik dengan keadaan sosial-ekonomi penduduk pribumi yang semakin terpuruk.³⁹ Penyebab utama masalah tersebut adalah ledakan pertumbuhan penduduk dan pada tahun 1900 merupakan periode ketika terjadinya lonjakan jumlah penduduk pribumi Jawa sebanyak dua kali lipat dari jumlah awal.⁴⁰ Pertambahan penduduk ini tidak sejalan dengan produksi bahan makanan. Rasa putus asa pun kerap kali menghampiri orang-orang kecil sehingga mereka menjual serta menggadai apa saja dan tak jarang banyak pribumi yang mati kelaparan ataupun terserang penyakit.

Sejalan dengan berkembangnya usaha perkebunan dan sistem pembayaran upah dalam bentuk uang, maka penggunaan uang pun mulai marak digunakan di pedesaan sebagai alat transaksi baru, hal ini mengubah pola konsumsi serta kebutuhan masyarakat. Pemerintah kolonial sebagai pihak penjajah tentunya merespon positif pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Priangan, akan tetapi

³⁸ Gunung Patuha adalah salah satu gunung api yang termasuk dalam bagian gunung yang mengelilingi Cekungan Bandung di bagian Selatan.

³⁹ Lubis, *Op. Cit.*, hlm 32.

⁴⁰ Baay, *Op.Cit.*, hlm 23.

ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi di masyarakat pribumi sangat mendalam yang mana keuntungan sebagian besar diperoleh serta dinikmati oleh pengusaha Eropa sedangkan bayaran yang diterima buruh pribumi tidak seberapa dan pengawasan yang ketat dari pemerintah kolonial membuat mereka sangat patuh terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial.⁴¹

Keadaan penduduk pribumi setelah tahun 1900 semakin jauh dari perekonomian kolonial. Kesiadaan penduduk pribumi untuk bekerja sebagai tenaga bayaran semakin meningkat walaupun sistem upah bukan hal yang biasa dilakukan sebelum abad ke-19. Meningkatnya keinginan penduduk pribumi untuk bekerja sebab sistem perekonomian kolonial memberikan penawaran keuntungan yang besar serta dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun hal ini tidak memberikan perbaikan yang signifikan untuk kehidupan mereka. Hal ini disebabkan oleh upah yang diterima oleh masyarakat pribumi sangat rendah.⁴²

Sekitar akhir abad ke-19 gambaran dari masyarakat pedesaan di Priangan sangat memprihatinkan dilihat dari penggunaan uang kontan yang jumlah nominalnya kecil pada saat melakukan transaksi perdagangan. Selain menggunakan uang, masyarakat pun masih menggunakan sistem barter (konsep timbal balik dan resiprositas) dalam transaksi ekonomi sehari-hari.⁴³ Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan uang oleh masyarakat terbatas hanya dalam hitungan sen. Uang logam tembaga merupakan nominal yang paling besar sehingga masyarakat desa menjadikan uang tersebut barang yang sangat eksklusif. Dalam dunia perdagangan

⁴¹ Zakaria, *Loc.Cit.*

⁴² Baay, *Op. Cit.*, hlm 26.

⁴³ Bambang Hidayana, "Konsep Resiprositas dalam Antropologi Ekonomi," *Humaniora* Vol. 3, No. 1 (2020) hlm 22.

internasional uang logam perak merupakan uang yang digunakan dalam transaksi bukan uang logam tembaga. Hal ini tentunya, membuat masyarakat mengalami kesulitan dan keterbatasan untuk bertransaksi dengan dunia luar.⁴⁴

2.2.2 Kondisi Sosial

Dilihat dalam aspek sosial hubungan antara nyai dengan tuan Eropa nya tidak semata hubungan secara personal, namun juga menggambarkan ketimpangan kekuasaan antara orang Eropa sebagai pihak penjajah dan perempuan pribumi sebagai pihak terjajah. Hubungan antara nyai dan lelaki Eropa tentunya tidak mempunyai perlindungan hukum yang jelas sebab hubungan mereka termasuk ke dalam hubungan tidak resmi. Sebagai perempuan yang lahir pada tahun 1884 dan berasal dari keluarga miskin di Priangan menjadikan Saila bekerja di usia muda untuk membantu keluarganya dan menjadi pembantu keluarga sekaligus nyai dari seorang sipir penjara bernama Eduard pada tahun 1900.⁴⁵ Hal ini membuat perempuan pribumi yang menjadi nyai seringkali berada dalam posisi yang rentan untuk dieksploitasi secara seksual maupun ekonomi.

Hubungan antara nyai dengan lelaki Eropa melahirkan anak-anak yang berdarah campuran Indo-Eropa. Kemunculan anak-anak campuran tersebut dianggap sebagai kebobrokan moral orang-orang Eropa di wilayah koloni. Anak-anak ini menggambarkan ketimpangan budaya antara masyarakat pribumi serta nilai-nilai Eropa yang bercirikan kerja keras serta beradab, namun disisi lain

⁴⁴ Handayani, *Op. Cit.* hlm 226.

⁴⁵ Baay, *Op. Cit.*, hlm 234.

memiliki sikap apatis dan berhubungan seks bebas dengan masyarakat pribumi.⁴⁶ Kaum Eropa totok maupun keluarga Indo yang terpandang selalu memandang mereka jijik sehingga penelantaran dan diskriminasi sering didapat oleh anak-anak yang berdarah campuran. Akibatnya, mereka terpinggirkan dan hidup dengan kegiatan amoral serta bekerja dengan pekerjaan rendahan.

Budaya feodal yang berlaku di Priangan Tengah mempunyai hubungan dengan adanya praktik nyai. Kaum menak sebagai lapisan kelas atas memiliki peran dalam kehidupan nyai. Tak jarang mereka menyediakan perempuan pribumi yang dijadikan sebagai nyai untuk pejabat maupun pengusaha Eropa. Hal ini dilakukan sebagai langkah dalam menjaga hubungan baik serta memperoleh keuntungan ekonomi.⁴⁷ Dapat dilihat bahwa praktik nyai yang terjadi di Priangan Tengah berkaitan dengan struktur kekuasaan serta kepentingan ekonomi.

2.2.3 Kondisi Politik

Sistem perekonomian yang diterapkan oleh pemerintah kolonial melatarbelakangi munculnya ideologi yang dominan di Belanda dan dikenal dengan nama sistem liberalisme. Liberalisme ekonomi di Priangan mendorong perkembangan dalam sektor perkebunan khususnya teh serta kopi yang menjadi komoditas ekspor utama.⁴⁸ Sistem perekonomian liberalisme pada dasarnya tetap menggunakan prinsip eksploitasi namun dibarengi dengan kebebasan pihak swasta dalam membuka perusahaan perkebunan. Hal ini tentunya menjadi daya tarik para

⁴⁶ France Gouda, *Dutch culture overseas: praktik kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942*, ed. Jugiarie Joegiarto dan Suma Riella Rusdiarti, II. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007) hlm 202.

⁴⁷ Karima, *Op. Cit.*, hlm 2-3.

⁴⁸ Handayani, *Op. Cit.*, hlm 222.

pengusaha Eropa untuk membuka usaha perkebunan dan secara langsung membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat pribumi sebagai buruh perkebunan.

Kondisi masyarakat yang tetap dieksploitasi oleh sistem perekonomian liberal memicu adanya kritik dari golongan cendekiawan serta politikus Belanda. Salah satunya Van Deventer menyatakan bahwa sudah seharusnya pemerintah tidak hanya mengeksploitasi namun juga memiliki tanggung jawab atas moral kepada penduduk penjajahan. Kritik yang ditulis oleh Van Deventer mendorong lahirnya politik etis pada 1901 yang diresmikan oleh Ratu Wilhelmina dan memiliki tiga program utama yaitu irigasi, imigrasi, dan edukasi. Politik etis menjadi sebuah pintu untuk masyarakat pribumi dalam memperbaiki kesejahteraan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya politik etis atau politik "balas budi" ini tetap bias kelas dan gender.⁴⁹

Pandangan bahwa perempuan lemah dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi membuat pendidikan di Hindia Belanda pada saat itu hanya berfokus kepada kaum laki-laki dan anak perempuan dari kelas bangsawan.⁵⁰ Perempuan yang berasal dari golongan somah atau rakyat biasa tidak tersentuh oleh program politik tersebut. Mereka tetap terpinggirkan baik secara sosial maupun hukum dan diposisikan sebagai objek eksploitasi seperti yang tercermin dalam praktik nyai. Namun, keterbatasan ruang gerak perempuan di ranah publik mendorong munculnya kesadaran dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Salah satunya

⁴⁹ Andrea Dinurul Aeni et al., "Gerakan Emansipasi Perempuan dalam Bidang Pendidikan di Jawa Barat Pada Awal Abad Kedua Puluh," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*. Vol 5, No. 1 (2022) hlm 45–57.

⁵⁰ *Ibid.*

adalah Raden Dewi Sartika yang berasal dari golongan menak yang memelopori gerakan emansipasi wanita melalui sekolah yang didirikannya.⁵¹

Kondisi sosial, ekonomi, politik di Priangan yang terjadi sekitar akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 menunjukkan bahwa dominasi kekuasaan pemerintah kolonial telah membentuk struktur masyarakat yang penuh dengan ketimpangan. Dilihat dari sisi ekonomi diterapkannya sistem tanam paksa yang memaksa petani lokal menanam komoditas ekspor seperti teh dan kopi sedangkan keuntungan hanya dirasakan oleh pihak Belanda. Pemerintah juga memanfaatkan kaum menak untuk memperkuat kontrol atas masyarakat pribumi dan adanya pembatasan peran perempuan dalam ranah publik. Kondisi seperti ini sejalan dengan teori kolonial yang dipaparkan oleh Loomba bahwa kolonialisme menghasilkan dominasi dalam berbagai aspek kehidupan sehingga memicu adanya ketidaksetaraan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya maupun gender. Dominasi tersebut muncul dari tujuan penjajah untuk dapat mengendalikan dan menguasai kelompok lain secara terstruktur dan berkesinambungan.⁵²

2.3 Kondisi Perempuan Priangan Tahun 1900-1942

Situasi di wilayah Priangan Tengah seperti Bandung, Sumedang, serta Garut dalam masyarakat kolonial membentuk sistem tatanan sosial masyarakat yang terstruktur serta maskulin seperti yang dijelaskan oleh Pitirim A Sorokin menyatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan pengelompokan atau perbedaan

⁵¹ Muhammad Rezza Septian, "Sakola Kaoetamaan Istri: Rejuvenasi Filosofi Pemikiran Raden Dewi Sartika dan Relevansinya terhadap Pendidikan, Bimbingan dan Konseling," *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*. Vol 4, No. 2 (2022) hlm 200.

⁵² Loomba, *Loc. Cit.*

yang ada di masyarakat dan bentuk kelas-kelas yang bertingkat, kelas tinggi, menengah serta rendah. Kepemilikan terhadap sesuatu yang berharga menjadi awal dari timbulnya sistem kelas dalam masyarakat.⁵³ Hal tersebut berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Priangan yang telah memiliki hierarki sosial sejak lama. Sistem hierarki memiliki pengaruh terhadap status sosial maupun kedudukan bagi perempuan. Pada awalnya struktur kekerabatan masyarakat Sunda memiliki sifat bilateral (parental) yang berarti laki-laki serta perempuan memiliki hak maupun kewajiban yang sama dalam sistem kekerabatan.⁵⁴ Namun, dalam kenyataannya kedudukan antara laki-laki serta perempuan terdapat perbedaan yang membuat perempuan menjadi kaum marjinal.



Gambar 2.1 Penilai Rasa Teh dikelilingi Perempuan Pribumi
Sumber: Koleksi KITLV, kode A39, tahun 1900, diakses pada 26 Mei 2025

Sekelompok perempuan pribumi yang bekerja di area pengolahan hasil perkebunan teh, sementara duduk seorang pria Eropa yang merupakan penilai rasa teh, bagian penting dalam mengontrol kualitas hasil perkebunan. Kehadiran pria

⁵³ Baharuddin, *Pengantar Sosiologi*, ed. Syamsul Arifin. (Mataram: Sanabil, 2021) hlm 74.

⁵⁴ Ekadjati, *Masyarakat Sunda dan Kebudayaan* (Bandung: PT Girimukti Pasaka, 1984) hlm 215.

Eropa tersebut memberikan pemahaman bahwa interaksi yang terjadi antara perempuan pribumi sebagai tenaga kerja yang tidak setara sebab bekerja di bawah pengawasan langsung oleh orang Eropa yang memegang kendali atas sistem produksi kolonial. Perempuan dalam foto tersebut menunjukkan bahwa mereka bekerja untuk mendorong kepentingan ekonomi kolonial serta keluarga mereka.

Perempuan selalu dinomorduakan sebab dalam keluarga Sunda ayah (pria) ditempatkan sebagai kepala keluarga serta bertanggung jawab dalam keluarganya dan sebagai pencari nafkah utama. Perempuan hanya difokuskan dalam urusan domestik rumah tangga. Selain itu, anak pertama terutama laki-laki dianggap sebagai pengganti kedudukan ayah, ketika sang ayah berhalangan lalu anak laki-laki juga memperoleh warisan sebanyak dua kali dibandingkan warisan yang diterima oleh anak wanita.⁵⁵

Namun, masuknya budaya patriarki pada masa feodalisme menempatkan perempuan Sunda sebagai subjek serta laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin dan pembuat keputusan. Feodalisme dapat diartikan sebagai salah satu faktor utama dalam kemunduran kedudukan perempuan di dalam masyarakat yang berawal sebagai subjek lalu berubah menjadi objek. Perempuan Sunda pada masa ini sangat lekat dengan istilah dapur, sumur, kasur.⁵⁶ Istilah tersebut mempunyai arti bahwa perempuan hanya dapat menjalani kewajiban untuk memasak serta semua urusan di dapur, lalu mencuci pakaian di sumur serta melayani suami.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 218.

⁵⁶ Ekadjati, *Op. Cit.*, hlm 203.

Dalam kehidupan sosial kedudukan perempuan sebagai kelas dua dapat dibuktikan pada masa kekuatan Mataram. Biasanya para bupati Priangan menyerahkan wanita cantik sebagai upeti. Tindakan ini diikuti oleh para bawahan Bupati yang merupakan kaum menak sebagai tanda bakti dan bersamaan dengan hasil bumi, penyerahan ini dinamakan dengan seba. Kegiatan seba pada awalnya yang diserahkan adalah anak sendiri, tetapi syarat dalam kegiatan ini mengalami perubahan. Anak yang diserahkan bukan lagi anak sendiri melainkan anak orang lain. Hal ini menyebabkan orang tua tidak mempunyai hak untuk menolak apabila para dalem meminta anaknya. Berbagai kemungkinan dapat terjadi pada sang anak, bisa dijadikan istri atau menjadi selir.⁵⁷

Sekitar abad ke-19 sampai awal abad ke-20 perempuan Indonesia seringkali menjadi korban diskriminasi dari kaum laki-laki yang berada di sekitarnya. Diskriminasi terhadap perempuan sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti ayah, suami, maupun saudara laki-lakinya. Hal ini diakibatkan oleh melekatnya budaya patriarki yang telah mengakar kuat di masyarakat serta adanya pandangan yang salah terhadap perempuan. Pada masa tersebut, perempuan dipandang sebagai individu kelas dua yang berarti kaum laki-laki mendominasi kaum perempuan. Feodalisme yang berkembang di masyarakat Sunda di masa lalu, memposisikan istri sebagai lambang dari status laki-laki sehingga wanita dijadikan objek oleh kaum lelaki, seperti pernikahan anak, nikah paksa, perceraian yang dilakukan sepihak oleh laki-laki tanpa melibatkan pendapat dari suara perempuan.⁵⁸

⁵⁷ Nina H Lubis, *Op. Cit.*, hlm 228.

⁵⁸ Komariyah dan Sumiyatun, "Perkembangan Pendidikan Sekolah Kautamaan Istri di Bandung Tahun 1904-1947," *Swarna Dipa* 6, no. 1 (2022) hlm 2-3.

Kondisi perempuan Sunda secara umum menjelang berakhirnya abad ke-19 dan awal abad ke-20 sangat tidak menguntungkan baik dari kalangan menak maupun somah (rakyat) sama-sama memerlukan perbaikan secara menyeluruh. Kondisi perempuan yang merupakan keturunan menak terkekang oleh adat istiadat yang ketat. Perempuan-perempuan tersebut menjalani kehidupan dalam situasi feodal yang terisolasi serta mengekang, dan berbagai kesibukan aktivitas keperempuanan yang tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan para gadis menak. Kegiatan perempuan pada masa itu hanya tertuju untuk pernikahan.⁵⁹

Terdapat beberapa faktor kemunduran perempuan dalam masyarakat Sunda. Pertama, ketika zaman Kerajaan Mataram feodalisme berkembang yang menempatkan istri sebagai simbol dari status seorang laki-laki, perempuan yang mulanya berkedudukan sebagai subjek bergeser menjadi objek. Kedua, kedatangan agama Islam dibarengi dengan adanya salah paham mengenai konsep perempuan dalam Islam, lalu kebiasaan orang Arab yang melihat perempuan lebih rendah dibanding laki-laki dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam.⁶⁰

Masalah status sosial dalam stratifikasi sosial masyarakat Sunda terbagi menjadi tiga golongan yang dimulai dari kaum *menak* (kelompok aristokrat) sebagai golongan sosial tertinggi, lalu diikuti dengan *santana* sebagai golongan menengah dan yang terakhir terdapat golongan paling rendah yang disebut dengan *somahan* dan cacah. Ketiga golongan tersebut dibagi berdasarkan tiga kriteria yang

⁵⁹ Marlina, *Op. Cit.*, hlm 186.”

⁶⁰ Bambang Daru Nugroho, “Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Kekerabatan Parental / Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda,” *Recital Review* 6, no. 1 (2024) hlm 416-417.

telah ditentukan pada masa itu. Adapun faktor yang menentukan adalah pertama faktor keturunan atau memiliki hubungan darah seseorang dengan penguasa, lalu seseorang yang memiliki jabatan dalam pemerintah sementara untuk golongan *menak* (elite) berdasarkan satu karakteristik yang telah disebutkan ataupun keduanya. Kriteria yang ketiga adalah seseorang yang memiliki hak terhadap tanah yang terkadang sebagian dari mereka berhubungan dengan kedudukan dalam struktur birokrasi sedangkan orang-orang yang tidak termasuk ke dalam tiga golongan tersebut dianggap sebagai orang kebanyakan.⁶¹



Gambar 2.2 Wanita pemetik teh di Jawa Barat 1926
Sumber: Arip Nasional Republik Indonesia

Seorang Perempuan pribumi dari Bandung menggondong keperluan bekerja di area Perkebunan teh, Tas yang dibawanya menunjukkan adanya kehidupan buruh perempuan yang telah terbiasa bekerja dengan memikul beban yang ganda antara

⁶¹ Mumuh Muhsin Z., “Struktur Sosial, Politik, Dan Pemilikan Tanah Di Priangan Abad Ke-19,” *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*. Vol. 3, no. 3 (2011) hlm 386.

beban kerja fisik, upah yang rendah tantangan sebagai perempuan yang hidup dalam sistem colonial. Pakaian yang dikenakan dan perawakan mereka memperlihatkan bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok somah. Kelompok somah merupakan masyarakat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan tuntutan produksi berbagai komoditas ekspor seperti teh maupun kopi. Foto tersebut menunjukkan bahwa perempuan pribumi di Priangan tengah diperlakukan sebagai alat untuk menunjang kebutuhan ekonomi kolonial maupun keluarganya yang dikendalikan oleh sistem kolonial dan budaya patriarki.

Somah (*commoners*) merupakan orang yang berada di luar pegawai pemerintah yang mayoritas mata pencahariannya adalah petani. Kelompok tersebut terbagi menjadi dua kelompok utama yaitu pribumi yang secara sederhana disebut sebagai *bumi*. Pribumi merupakan penduduk inti (*kerndorpers*) yang telah menduduki lahan tersebut sejak pertama sehingga menjadi pemilik tanah yang mereka buka dan mempunyai rumah beserta halaman. Pribumi mempunyai hak waris atas tanah sehingga tanah mereka dapat diperjualbelikan. Tentunya mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak, mempekerjakan buruh (*corvee-labour*), serta menyerahkan kopi.⁶²

Kelompok kedua merupakan keluarga yang tidak mempunyai tanah (*landless households*). Terdapat empat jenis rumah tangga yang berbeda. Pertama disebut dengan manumpang yaitu mempunyai rumah beserta halaman namun tidak mempunyai tanah (sawah maupun kebun). Mereka bekerja sebagai penyewa kepada kelompok pribumi sebagai buruh tanam dengan sistem bagi hasil. Manumpang bisa

⁶² *Ibid*, hlm 391.

berganti kelompok menjadi pribumi ketika berhasil mempunyai tanah sendiri dengan kerja kerasnya. Kedua, rahayat yang tak hanya bekerja kepada kaum menak, namun kepada keluarga pribumi. Selain menjadi pelayan kelompok rahayat juga menanam tanaman di tanah milik patronnya dengan sistem bagi hasil.⁶³

Kelompok ketiga yaitu disebut sebagai kostangers, orang yang bertempat tinggal di tanah menak atau pribumi. Kelompok ini bekerja kepada pemilik tanah atau yang dikenal sebagai juragan. Keempat terdapat kelompok bujang yang bekerja sebagai buruh bebas dengan pekerjaan serabutan di berbagai bidang seperti pertanian, pengangkutan, dan lainnya. Bagi kelompok bujang pekerjaan apapun tak masalah sebab yang terpenting adalah mendapatkan upah. Selain dari keempat kelompok tersebut juga terdapat kelompok kecil pedagang yang berperan juga sebagai rumah tangga petani.⁶⁴

Awal abad ke-20 perempuan di Priangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan seperti perceraian, poligami, praktik nyai, pelacuran, sampai perdagangan perempuan.⁶⁵ Sejalan dengan pendapat yang dijelaskan oleh A. Fatikhul Amin Abdullah bahwa terdapat banyak ketidakadilan dalam adat istiadat yang berlaku dalam sistem perkawinan, seperti kawin paksa, nikah, muda, sistem poligami, sistem selir, lalu adanya sistem nyai yang berkembang di masyarakat kolonial tentunya menjadikan perempuan selalu dinomorduakan oleh keluarganya.⁶⁶ Perempuan yang menjadi wanita simpanan lelaki Eropa ini

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Lubis, *Op. Cit.*, hlm 8

⁶⁵ Komariyah Sumiyatun, *Op. Cit.* hlm 5.

⁶⁶ A Fatikhul Amin Abdullah Et Al., "Perempuan Indonesia Sampai Awal Abad Ke-20" 1, No. 1 (2019) hlm 21.

menjelma sebagai praktik yang kompleks sebab memiliki pengaruh terhadap semua aspek kehidupan perempuan.

Praktik nyai yang terjadi di Priangan menggambarkan adanya ketimpangan gender serta adanya dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial melalui berbagai norma budaya serta ekonomi. Perempuan pribumi yang bekerja sebagai nyai tentunya harus menghiraukan stereotip yang beredar di masyarakat. Budaya patriarki yang tumbuh di wilayah Priangan tentunya mempunyai pengaruh terhadap adanya praktik nyai. Budaya ini dimanfaatkan oleh laki-laki Eropa untuk melahirkan lingkungan yang membuat perempuan pribumi dilihat sebagai objek yang mudah untuk dieksploitasi.



Gambar 2.3 Wanita pemetik teh di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat 1926
Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia

Ketika mereka bekerja di perkebunan terdapat beberapa pekerjaan yang mereka lakukan antara lain menanam, memetik, memelihara tanaman, memupuk serta menyingi rumput sedangkan dalam bidang industri bekerja sebagai penyortir

biji kopi, mengepak gula dan sebagai pembantu rumah tangga.⁶⁷ Tak sedikit perempuan yang bekerja sebagai buruh tani untuk membantu perekonomian keluarga. Hadirnya perempuan sebagai buruh di perkebunan menguntungkan para pemilik modal sebab dapat menekan biaya produksi dengan murah. Bayaran yang diterima oleh perempuan yaitu sebesar 2,5 gulden per bulan yang setara dengan 8 sen sehari⁶⁸ sedangkan upah buruh laki-laki berkisar antara 30-50 sen per hari.⁶⁹ Banyak perusahaan yang menambahkan aturan dalam kontrak kerja tersebut bahwa bila perempuan tidak bekerja maka tidak akan mendapat upah.

Perempuan yang bekerja di perkebunan umumnya menjalani hidup yang lebih berat dibanding buruh laki-laki sebab dalam kedudukan di dunia perkebunan posisi perempuan tersebut berada dalam tingkat rendah. Selama bekerja di perkebunan memungkinkan terjadinya hubungan pernikahan sesama kuli yang disebut dengan kawin kontrak ditandai dengan aturan-aturan yang longgar. Kehidupan kawin kontrak di dalam perkebunan tidak memungkinkan berjalan normal seperti keluarga pada umumnya, namun yang terjadi adalah perempuan yang menjadi istri kuli melacurkan diri atau menjadi teman tidur untuk para kuli yang berada di perkebunan.⁷⁰

Selain menikah dengan kuli, perempuan yang bekerja di sektor perkebunan tentunya menimbulkan interaksi dengan para mandor yang berkebangsaan Belanda.

⁶⁷ Domini BB Hera dan Daya Negri Wijaya, "Terasing Dalam Budaya Barat Dan Timur: Potret 'Nyai' Hindia Belanda, Abad Xvii-Xx," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 16, no.1 (2014) hlm 51.

⁶⁸ Baay, *Op. Cit.*, hlm 140

⁶⁹ Karl J. Pelzer, *Toeian keboen dan Petani*, ed. Rumbo J, 1 ed. (Jakarta: Sinar Harapan, 1985) hlm 139.

⁷⁰ Domini BB Hera dan Daya Negri Wijaya, *Loc. Cit.*

Tak jarang akibat interaksi yang sering dilakukan antara perempuan pribumi dengan lelaki Eropa ini menimbulkan ketertarikan lelaki Eropa untuk menjadikan perempuan pribumi sebagai nyai. Buruh kontrak perempuan yang menjadi gundik cenderung menjadi korban dari penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan kekuasaan para pengusaha Eropa.⁷¹ Reggie Baay menjelaskan bahwa sudah menjadi rahasia umum jika seorang penguasa ataupun pegawai Eropa tiba-tiba memanggil seorang buruh perempuan di tengah kerjanya yang kemudian memisahkan diri bersamanya. Tidak menjadi persoalan yang penting jika seorang buruh perempuan telah menikah dan bersuami pribumi. Para lelaki Eropa beranggapan bahwa pernikahan tidak pantas disematkan kepada para kuli yang dapat dilihat dari perilaku mereka yang tidak menunjukkan kesetiaan dan tindakan asusila yang dibuatnya.⁷²

Kedudukan perempuan di Priangan pada masa kolonial menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata antara golongan menak dan golongan somah. Ketimpangan ini tentunya membentuk pola pikir yang berbeda sehingga ketimpangan yang terjadi dianggap wajar terutama bagi kalangan perempuan pribumi yang berasal dari kelas somah. Sejalan dengan teori hegemoni yang dijelaskan oleh Gramsci bahwa terciptanya hubungan dominasi tidak hanya disebabkan oleh kekerasan atau aturan hukum melainkan adanya persetujuan serta cara berpikir yang telah dibangun oleh penguasa.⁷³ Perempuan pribumi yang menjadi nyai tanpa sadar menerima cara berpikir kolonial juga nilai-nilai patriarki

⁷¹ *Ibid*, hlm 196-204.

⁷² Baay, *Loc. Cit.*

⁷³ Gramsci, *Loc. Cit.*

sehingga terbiasa dengan pola yang menempatkan mereka dalam posisi rentan. Adanya ketimpangan kedudukan antara perempuan pribumi yang menjadi nyai dan laki-laki Eropa menjadi bukti nyata bahwa hubungan hegemoni sangat mempengaruhi kehidupan perempuan pribumi di Priangan.